

## **SKRIPSI**



### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa)**

**Oleh**

**YENNI WIDYASTUTI**

**B 111 10 906**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa)**

Oleh

YENNI WIDYASTUTI

NIM B 111 10 906

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Pada Bagian Hukum  
Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2014

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**YENNI WIDYASTUTI**

**NIM B 111 10 906**

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Selasa, 4 Februari 2014  
dan Dinyatakan Lulus

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.  
NIP. 19531124197912 1 001



Nur Azisa, S.H.,M.H.  
NIP. 19671010199202 002

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. J. Abrar Saleng, S.H.,M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Yenni Widyastuti  
NIM : B 111 10 906  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Nomor Putusan : 49/Pid.B/2013/Pn.Sungg).

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 27 Desember 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H.  
NIP. 19531124197912 1 001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010199202 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **YENNI WIDYASTUTI**

No. Pokok : B111 10 906

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang  
Dialkukan oleh Anak  
(Studi Kasus Nomor Putusan :49/Pid.B/2013/PN.Sungg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2014



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**Yenni Widyastuti B11110906 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.B/2013/PN.Sungg)** dibawah bimbingan bapak **M. Syukri Akub** sebagai pembimbing I dan ibu **Nur azisa** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungg dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungg.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan dengan mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang berkaitan dalam menangani kasus pencabulan tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa

a) Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Sungg telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KUHP. Berawal dari Rumusan surat dakwaan tersebut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan Pasal-Pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Syamsul Basir Bin M. Basir dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungg menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Syamsul Basir sebagai pelaku pencabulan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menyangkut berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang menurut penulis tidak seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan hal yang meringankan terdakwa antara lain sopan di persidangan, dan berterus terang selama persidangan, karena hal yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu kewajiban bagi terdakwa yang bersalah dalam persidangan selain itu hal tersebut sama sekali tidak menjamin bahwa terpidana sungguh-sungguh memiliki sifat-sifat atau kepribadian yang baik. Kemudian, masih terdapat

hal-hal yang memberatkan yakni sifat dari perbuatan terdakwa, adapun yang dimaksud dalam hal ini yaitu sifat perbuatan terdakwa yang bukan hanya melanggar hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma lain seperti norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Sehingga telah tepat hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan, akan tetapi terdapat sedikit kekeliruan dalam penjatuhan pidana tersebut karena seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 seharusnya apabila denda tidak dapat dibayar maka digantikan dengan latihan kerja bukan digantikan dengan kurungan. Hal ini menggambarkan bahwa hakim dalam proses persidangan pada anak selalu mengedepankan sanksi pidana yang sedikit banyak beretentangan dengan asas *the last resort*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdullillaahi rabbil 'aalamiin.* Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan begitu banyak karunianya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Sungg.).

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu. Terkhusus kepada orang yang paling berharga sepanjang hidup penulis, Ayahanda **A. Pallawagau** dan ibunda **Hj. Salmah** yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang menjadi suatu motivasi dan semangat penulis untuk meraih cita-cita, serta terima kasih kepada tante saya **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.** yang senantiasa membantu, membimbing dan memberikan dukungan moril selama ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Saudara-saudaraku **Shaum, Cakir, Ikka**, dan **Surya**, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kalian untuk penulis selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Muh. Ikram Nur Fuady** yang senantiasa



menyemangati, menginspirasi, serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.Bo., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Romi Librayanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh jajarannya;
3. Ketua bagian Hukum Pidana Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H dan sekretaris bagian Ibu Nur Azisah, S.H., M.H.;
4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan, Ibu Nur azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., Ibu Dr. Dara Indawati, S.H., M.H dan Ibu Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H selaku Penguji Penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh staf

Akademik yang memberikan bantuan sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi;

7. Bapak Latief, S.H. yang telah penulis repotkan selama proses pra penelitian dan proses penelitian berlangsung;
8. Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir;
9. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas terkhusus ibu Nurhidayah, S.Hum dan kak Afiah Mukhtar, S.pd serta Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Sahabat-sahabatku grup Hele-Hele, Wajda, Athy, Icha, Fika, Putri, Vera, kanda Novi, marwah, Fitri, Maryam, Asma dan masih banyak lagi. Terima kasih atas dukungan dan ketulusan kalian;
11. Teman-teman serta sahabat-sahabatku penghuni kelas K (Konstitusi), Kak Zul, Tadin, Adi, Ridwan, Jumardi, Helmi, fahmi dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kalian tetap eksis di kemudian hari;
12. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH). Kak opu, Kak Chua, kak Icha, kak Afif, kak Uphy, Icmi, Gunawan, Irfan, Mhule, Haidir;

13. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH-UH), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM FH-UH) dan seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Terima kasih atas kerjasamanya.
14. Teman-teman Angkatan 2010 (LEGITIMASI) FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan.
15. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 85 Unhas khususnya Desa Pongko Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu. kak Gallang, kak Ronald, Nawir, dan Lastri. Terima Kasih atas persaudaraan, kebersamaan dan kerjasamanya;
16. Terima kasih untuk kalian semua, yang selalu membuat Penulis senyum dan selalu menyemangati dalam melakukan aktivitas kampus.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum yang berminat terhadap karya ini.

Makassar, 7 Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Umum .....	7
1. Pengertian Tindak Pidana .....	7
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	10
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	12
B. Unsur-Unsur tindak Pidana .....	15
1. Ada Perbuatan Yang Mencocoki Rumusan Delik.....	17
2. Ada Sifat Melawan Hukum .....	17
3. Tidak Ada Alasan Pembena.....	19

C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	24
1. Mampu Bertanggungjawab .....	25
2. Kesalahan .....	26
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf .....	30
D. Pidana dan Pemidanaan .....	32
1. Teori Tujuan Pemidanaan .....	32
2. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHPidana .....	34
3. Pemidanaan Terhadap Anak .....	43
E. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tindak Pidana Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Anak .....	49
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	52
1. Pertimbangan Yuridis .....	52
2. Pertimbangan Non Yuridis .....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	58
B. Jenis dan Sumber Data .....	58
C. Teknik Pengumpulan Data .....	59
D. Analisis Data .....	59

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Identitas Terdakwa .....	61
B. Posisi Kasus .....	61
C. Dakwaan Penuntut Umum .....	62
D. Tuntutan Penuntut Umum .....	63

E. Pertimbangan Hukum Hakim .....	64
F. Amar Putusan .....	68
G. Analisis Penulis .....	69
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>1</sup>

Hal di atas berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan sampai sekarang. Namun, hingga keluarnya Undang-Undang Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak sekarang. Situasi dan kondisi anak sekarang apabila dilihat dari sisi pendidikan, anak Indonesia dikatakan belum sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi haknya secara utuh, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah. Selain putus sekolah juga banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal 35..



Perlu disadari bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini bisa karena beberapa

faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak. Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana**

**Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Nomor Putusan : 49/Pid.B/2013/Pn.Sungg).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penulis skripsi ini diharapkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi salah satu instrumen sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.
2. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada masyarakat umumnya atau hakim khususnya dalam mengambil keputusan yang berhubungan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Umum

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana perbuatan cabul, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi dari tindak pidana. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak

---

<sup>2</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>3</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>5</sup>
3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 48.

<sup>4</sup> Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.<sup>6</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanaanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>7</sup>
2. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
3. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 185.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 72

perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Selanjutnya akan dijelaskan pengertian tindak pidana perbuatan cabul atau pencabulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cabul adalah (kata sifat) keji, kotor. Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji. Sedangkan, Perbuatan cabul secara umum adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212.



Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dari pengertian di atas, dapatlah diketahui oleh siapapun yang tidak memiliki legalitas hukum dalam hubungan suami istri tetap dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yang telah diterangkan dibagian muka, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis kedalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.<sup>10</sup>

Landasan yuridis mengenai tindakan pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu Pasal 289 sampai dengan

---

<sup>9</sup> Chazawi Adami, 2002. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanean*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 80

Pasal 296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 KUHP.

### **3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Dewasa ini banyak terlihat kejahatan-kejahatan yang melibatkan peran seorang anak, baik itu sebagai korban dari sebuah tindak kejahatan, maupun sebagai pelaku dari tindak kejahatan itu sendiri. Sebelum lebih jauh diuraikan tentang pengertian anak sebagai pelaku tindak kejahatan, terlebih dahulu diuraikan pengertian anak itu sendiri.

Pengertian mengenai anak banyak dijumpai dalam perundang-undangan di Indonesia dengan suatu definisi atau penjelasan yang sangat beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa “ Anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini memiliki kemiripan dengan pengertian anak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut maka telah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 12 Februari 2011 menyatakan frasa “8 (delapan) tahun” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut, khususnya terkait dengan frasa “8 (delapan) tahun”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “12 (dua belas) tahun”.

Pada 30 Juli 2012, DPR –RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan

mengantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dua tahun sejak diundangkan yang akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Meskipun terdapat beberapa pengertian mengenai anak sebagaimana yang diuraikan di atas, akan tetapi skripsi ini lebih menitik beratkan pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikarenakan Undang-Undang ini telah khusus membahas tentang anak sebagai pelaku tindak kejahatan.

Lebih lanjut membahas mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, berikut akan diuraikan pengertian tentang pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka

yang oleh Undang-Undang dikatakan belum dewasa melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Meskipun demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan atas hak-hak anak dalam menjalani sebuah proses peradilan atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan vonis hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana, Hakim patut memperhatikan secara cermat akan jaminan masa depan si anak kelak dikemudian hari atas vonis yang dijalaninya nanti.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responbility*)<sup>11</sup>.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi<sup>12</sup>:

a. Ada perbuatan;

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Op. cit.*, hlm. 38 .

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi<sup>13</sup>:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi<sup>14</sup>:

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Kesalahan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 43

Menurut Penulis lebih tepat dikatakan bahwa syarat pemidanaan terdiri dari dua unsur yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif. Kedua unsur ini memiliki hubungan erat, yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya tidak ada tindak pidana.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsure-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2. Ada sifat melawan hukum

Dalam dogmatic hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk mengetahui artinya.

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu<sup>15</sup> :

a. Sifat Melawan Hukum Umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat Melawan hukum Khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan :sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c. Sifat Melawan Hukum Formal

Istilah ini berarti : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d. Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

---

<sup>15</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 57.



Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara<sup>16</sup>.

Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM BPHN atau BABINKUMNAS memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan<sup>17</sup>.

### 3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain:

#### a. Daya paksa absolut.

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>18</sup> I Made Widnyana, *Op.Cit.*, hlm 138

kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (*vis absoluta*) dan daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.<sup>20</sup>

Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.<sup>21</sup>

Vos berpendapat jika *vis absoluta* dimasukkan ke dalam daya paksa dinilai berlebihan, karena pembuat yang dipaksa secara fisik sebenarnya tidak berbuat. Perbuatan itu berarti perbuatan yang disadari dan orang yang memaksa sebagai pembuat secara langsung. Orang yang

---

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 63.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

dipaksa tidak termasuk dalam rumusan delik. Jadi, semestinya mendapat putusan bebas bukan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>22</sup>

b. Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Menurut Pasal ini, untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan<sup>23</sup> :

- Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
- Serangan itu bersifat melawan hukum;
- Pembelaan merupakan keharusan;
- Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP)

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (*proporsionaliteit*). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), artinya untuk mempertahankan

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>23</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 144.

kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain<sup>24</sup>.

c. Menjalankan ketentuan undang-undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:

*“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”*

Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan (*verordening*) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang.

Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusannya (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Misalnya, undang-undang telah memberikan kewenangan pada penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka dengan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang juga ditetapkan (surat perintah). Dalam melaksanakan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang, penyidik dapat melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu seperti memukul bahkan menembak untuk melumpuhkan sepanjang diperlukan.

d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”*

Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. *Hoge Raad* memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (*HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266*)<sup>26</sup>.

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang member perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>27</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm 149.

### C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak<sup>28</sup>.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan<sup>29</sup> :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila<sup>30</sup> :

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu

---

<sup>28</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>29</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 59.

bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Mampu bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;

- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

## 2. Kesalahan

Pompe mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).<sup>31</sup>

Mezger, menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.<sup>32</sup>

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hal. 65.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 65.

<sup>33</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm 77-78.



Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu.<sup>34</sup>

1) Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 78-83.

Sudarto mengatakan, bahwa dalam ilmu pengetahuan dikenal beberapa macam kesengajaan, yaitu<sup>35</sup> :

1) *Dolus Premeditatus*

Merupakan kesengajaan yang bila tidak ada pengakuan dari tersangka, maka harus disimpulkan dari hal-hal yang lahir (*objective omstandigheden*), ialah apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang dilakukan si pembuat sebelumnya. Terdapat dalam delik-delik yang dirumuskan dalam pasal 353, 340, 342 KUHP.

2) *Dolus Determinatus dan Indeterminatus*

Unsurnya ialah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak. Pada *dolus determinatus*, pembuat misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada *dolus indeterminatus*, pembuat misalnya, menembak ke arah gerombolan orang, atau menembak penumpang-penumpang dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracuni *reservoir* air minum dan sebagainya.

3) *Dolus Alternativus*

Dalam hal ini, si pembuat menghendaki atau A atau B, akibat yang satu atau yang lain.

4) *Dolus Indirectus, Versari in re Illicita*

Ajaran *Dolus Indirectus* mengatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak

---

<sup>35</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 70.

diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Si pelaku tetap dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya dan timbul secara kebetulan.

5) *Dolus directus*

*Dolus directus* berarti bahwa kesengajaan si pembuat tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

6) *Dolus Generalis*

Pada delik materiil harus ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

b. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- 2) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang

oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau *culpa* yaitu<sup>36</sup>:

a. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)

*Conscious*: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh.

b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

*Unconscious*: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:

a. Daya paksa relative (*Overmacht*);

*Overmacht* merupakan daya paksa relative (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit).

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*);

---

<sup>36</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm 84-85.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah<sup>37</sup> :

- Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat;
- Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat;
- Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenaran karena melawan hukumnya tidak ada.

c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah.

Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang;
- b. Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 90.

#### **D. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

##### **1. Teori Pemidanaan**

Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu :

###### **a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

###### **b. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan

yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang. Ada dua macam prevensi yang dikenal yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan ancaman akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan kepada si penjahat agar si penjahat takut melakukan kejahatan, sedangkan dalam prevensi umum suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar semua orang takut melakukan kejahatan.

#### c. Teori Gabungan

Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>38</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pada waktu apa yang disebut *Wetboek va Strafrecht voor Indonesie*, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana Pokok itu terdiri atas:<sup>39</sup>

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Pidana kurungan,
- 4) Pidana denda,

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- 1) Pencabutan dari hak-hak tertentu,
- 2) Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan
- 3) Pengumuman dari putusan hakim.

Dari ketentuan pada Pasal 10 KUHP tersebut, jelaslah bahwa stelsel pidana kita menurut KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Di samping itu urutan dari pidana ini mulai dari

---

<sup>38</sup> Lit. A.Z. Abidin, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta hal. 42.

<sup>39</sup> Lamintang, P.A.F, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.



yang terberat ke yang lebih ringan. Pidana Pokok jelas lebih berat dari pidana tambahan. Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan pada salah satu pidana pokok, jadi bersifat imperatif.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, maka akan uraikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

#### 1) Pidana Mati

Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat/pandangan. Adapun pengertian pidana mati yaitu Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya.

Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:

- a) Kejahatan terhadap negara ( Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 124 ayat (3) KUHP)
- b) Pembunuhan dengan berencana ( Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP)
- c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

---

<sup>40</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 82.

- d) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman pidana mati ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana khusus lainnya seperti:<sup>41</sup>

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
- c) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila :

- a) Kejahatan diancam dengan pidana mati.
- b) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- c) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, *residive* atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.
- d) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 349 KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan azas-azas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.

### 3) Pidana Kurungan

Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP).
- b) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2) KUHP.
- c) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan nama *pistole*)

Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 tahun).

Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana kurungan juga mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda

adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Selanjutnya akan di uraikan pula jenis-jenis pidana tambahan sebagai berikut :

#### 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim;
- b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.

## 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Adapun Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain:

- a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu;
- b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, atautkah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

### 3) Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang

telah diatur di dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, dan seterusnya, serta Pasal 396 dan seterusnya KUHP. Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya.



Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang.

### **3. Pemidanaan Terhadap Anak**

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan ancaman sanksi pidana bagi anak diatur secara khusus dalam tiga Pasal, yaitu Pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Adapun pengaturan sistem pemidanaan secara umum tersebar dalam ketentuan umum Buku I KUHP.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seharusnya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa.

Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental dengan maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik yang menyangkut hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>42</sup>

Jika anak melakukan tindak pidana maka menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan tambahan bagi anak nakal.<sup>43</sup>

a. Pidana Pokok

Ada pidana pokok dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu :

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda, atau
- 4) Pidana pengawasan

b. Pidana tambahan

---

<sup>42</sup> Nandang Sambas, 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Bandung, hlm 82.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 84

Seperti telah disebutkan bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa :<sup>44</sup>

- 1) Perampasan barang-brang tertentu, dan atau
- 2) Pembayaran ganti rugi

c. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah :<sup>45</sup>

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

d. Pidana penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman pidana oarang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

e. Pidana kurungan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 85

Dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-Undang Pengadilan anak bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

f. Pidana denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang Pengadilan Anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut dinyatakan tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (Pasal 28 ayat (2)).

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28 ayat (3)). Tentunya demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

g. Pidana bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan perumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

- 1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan selama paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun
- 2) Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
  - b) Syarat khusus, yaitu anak melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebebasan anak.
- 3) Pengawasan dan pembimbingan
  - a) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah dilakukan.
  - b) Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai permasyarakatan berstatus sebagai klien permasyarakatan.

c) Selama anak nakal berstatus sebagai klien masyarakat dapat mengikuti pendidikan sekolah.

h. Pidana pengawasan

Ketentuan bentuk dan cara pelaksanaan pidana pengawasan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hendaknya nanti materi yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Khusus Pasal 30.

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah tersebut dilakukan oleh jaksa.
- 3) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing masyarakat.

**E. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tindak Pidana Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Anak**

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk mencegah dan penanggulang kejahatan terhadap anak-anak yaitu tentang kejahatan yang berupa

kekerasan terhadap anak, khususnya dalam masalah kasus pencabulan pada anak-anak. Ketentuan yang mengatur dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak-anak terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan diatur pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP adalah unsur memaksa sebagai suatu perbuatan yang demikian rupa sehingga tak berdaya untuk menghindarinya. Kekerasan yang dimaksudkan yaitu setiap perbuatan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi. Orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan tidak ditegaskan dalam rumusan Pasal 289, maksud yang sebenarnya adalah si pembuat yang memaksa.

Akan tetapi, karena dalam Pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri.

Pembuat undang-undang ternyata tidak perlu untuk menentukan bagi perempuan yang memaksa terhadap laki-laki untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata paksaan oleh perempuan terhadap laki-laki tersebut dipandang sebagai ketidakmungkinan, akan tetapi justru karena perbuatan itu oleh laki-laki dipandang sebagai sesuatu yang tidak mengakibatkan kerugian. Disini dapat dikatakan bahwa bukankah perempuan ada bahaya untuk hamil dan melahirkan anak. Oleh karena itu, seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, termasuk pula dalam Pasal ini yaitu persetubuhan harus benar-benar dilakukan, sehingga dapat dikenakan Pasal 289 yang menyatakan tentang perbuatan cabul.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur BUKU II KUHP Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 82 yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Jika diuraikan lebih lanjut, maka unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagai berikut :

- Setiap Orang

Merupakan unsur subjektif yang berarti adanya pelaku (orang yang dapat bertanggungjawab) yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal ini.

- Dengan Sengaja

Merupakan unsur subjektif yang berasal dari dalam diri si pelaku, yang mana si pelaku secara sadar betul, mengerti dan menghendaki perbuatan yang ia dilakukan.

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Pada dasarnya unsur ini memiliki kemiripan dengan unsur yang disebutkan dalam Pasal 290 ayat (3) yakni adanya tindakan kekerasan, paksaan, serangkaian kebohongan dan tipu muslihat serta bujukan yang dilakukan kepada anak dengan maksud agar si anak mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si pelaku.

- Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul.

Inilah unsur terakhir yang mana merupakan tujuan utama dari si pelaku melakukan serangkaian kekerasan, bujukan , serta kebohongan terhadap anak, agar si anak mau dilakukan cabul atas dirinya

## **F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan Hakim.

Lazimnya dalam praktik peradilan dalam putusan Hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan Hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut menurut praktek lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antar fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis, pandangan doktrin yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Dalam putusan Hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik, dimana Terdakwa/Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan kongkritnya harus ditetapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa sifatnya esensial. Dalam pertimbangan pada putusan Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan Hakim, redaksi dapat berupa kalimat "Menimbang bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan....melanggar Pasal....telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya”.

Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Kemudian setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut di atas. Lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop*.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana.

## **2. Pertimbangan Non Yuridis (Laporan Pembimbing Masyarakat)**

Dalam proses persidangan, anak sebagai peaku tindak pidana, Hakim juga harus mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan hanya

digunakan dalam proses persidangan yang menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Laporan ini berguna bagi Hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga hasil putusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan anak.

Pengaturan mengenai Laporan Pembimbing Kemasyarakatan terdapat pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

Pasal 56 :

- (1) Sebelum persidangan dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), berisi :
  - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, dan
  - b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Sebuah laporan Pembimbing Kemasyarakatan dibuat oleh seorang petugas sosial (*social worker*) Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BIPAS) dalam bentuk suatu *case study* (studi kasus). Gambaran mengenai keadaan si anak terdapat dalam studi kasus berupa:

1. Masalah sosialnya;
2. Kepribadiannya;
3. Latar belakang kehidupannya, contoh :
  - Riwayat sejak kecil;nya
  - Pergaulannya di luar dan di dalam rumah;
  - Hubungan interaksi antara bapak, Ibu dan si anak;

- Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lainnya;
- Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Data-data yang diperlukan dalam rangka pembuatan laporan Bimbingan Kemasyarakatan diperoleh dari keterangan si anak sendiri, orang tua anak, dan lingkungan sekitar anak.

Hasil dari laporan Bimbingan Kemasyarakatan tidaklah bersifat mengingat Hakim tetapi merupan suatu alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh Hakim. Sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana anak di muka Pengadilan.

Dengan keberadaan laporan Bimbingan Kemasyarakatan diharapkan Hakim dapat lebih mengenal pribadi anak dan mengerti kondisi sebenarnya yang dialami oleh anak sebagai latar belakang terjadinya suatu tindak pidana oleh anak. Sehingga hasil putusan dari hakim dapat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Dimana putusan Hakim haruslah lebih mengedepankan pemberian bimbingan edukatif, disamping yang bersifat menghukum.

Pertimbangan Hakim sendiri terdiri atas dua pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang dapat menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang dapat menjadi dasar alasan bagi

Hakim agar pada putusannya, sanksi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat dikurangi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan serta di beberapa toko buku di wilayah kota Makassar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri sungguminasa yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data sekunder, Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan meneliti dokumen. Dokumen berupa : Keputusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Berita Acara



Persidangan, surat dakwaan, BAP kepolisian Gowa Sungguminasa.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Penelitian**

Untuk menjaring data yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi).
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada dalam perkara tersebut mulai pada tingkat pemeriksaan pendahuluan (tingkat penyidikan) sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

## **D. Analisis Data**

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang

telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : SYAMSUL BASIR BiN BASIR Dg. SITABA

Tempat lahir : Rappokaleleng

Umur/tanggal lahir : 16 tahun/19 Maret 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

kebangsaaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rappokaleleng Kelurahan Tamalayyang,  
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

#### **B. Posisi Kasus**

Pada awalnya korban Citra Kusmira Dewi, pada hari Selasa tanggal 15 januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA, Pada waktu itu korban Citra Kusmira Dewi sedang dibonceng dengan saksi Karmila dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalanan tersebut, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa yang juga dibonceng oleh temannya Kamal mengikuti sepeda motor korban Citra Kusmira Dewi dan setelah posisi sepeda motor terdakwa sejajar dengan sepeda motor korban Citra

Kusmira Dewi, terdakwa memegang pundak dari korban Citra Kusmira Dewi dan meminta nomor handphone korban lalu korban berkata: “Tidak ada *handphone*ku” lalu terdakwa mengatakan: “Alasan ko”, lalu terdakwa tiba-tiba menarik lengan baju saksi korban dan langsung dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara korban Citra Kusmira Dewi. Selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa: “Apa Maumu?”, lalu terdakwa menendang sepeda motor korban sehingga sepeda motor oleng dan korban Citra Kusmira Dewi pingsan diatas sepeda motor lalu terjatuh dari sepeda motor setelah itu terdakwa sempat meludahi korban Citra Kusmira Dewi dan ludah tersebut sempat mengenai tangan dari korban Citra Kusmira Dewi ketika itu, setelah kejadian itu terdakwa lari meninggalkan korban Citra Kusmira Dewi sambil mengacungkan jempol ke arah bawah.

### **C. Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa ia terdakwa Syamsul Basir Bin M. Basir Dg. Sitaba, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, bertempat di Kampung Parinring, Desa Bontolangsa Utara, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya kegiatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu itu saksi korban Citra Kusmira Dewi sedang dibonceng dengan saksi Karmila dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalanan tersebut, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa yang juga dibonceng oleh KAMAL mengikuti sepeda motor korban Citra Kusmira Dewi dan dari arah belakang terdakwa memegang kerah baju dari saksi korban Citra Kusmira Dewi dan setelah posisi sepeda motor terdakwa saksi korban sejajar dengan sepeda motor saksi korban Citra Kusmira

Dewi, tiba-tiba langsung dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara saksi korban Citra Kusmira Dewi sehingga sepeda motor oleng dan saksi korban Citra Kusmira Dewi terjatuh dari sepeda motor tapi tidak dalam kondisi terluka dan setelah itu terdakwa sempat meludahi saksi korban Citra Kusmira Dewi dan ludah tersebut sempat mengenai tangan dari saksi Citra Kusmira Dewi ketika itu, setelah kejadian itu terdakwa lari meninggalkan saksi korban Citra Kusmira Dewi, atas kejadian tersebut saksi korban Citra Kusmira Dewi mengalami rasa sakit pada bagian payudara sebelah kanan akibat tindakan terdakwa yang telah meremas payudara saksi korban Citra Kusmira Dewi dan merasa sangat malu atas kejadian tersebut serta melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### **D. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Syamsul Basir Bin M. Basir Dg. Sitaba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada didalam tahanan.
- c. memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- **Nota Pembelaan (*Pledooi*)**

Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis yang pada bagian akhir nota pembelaanya tersebut pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa diberi tindakan atau hukuman yang ringan-ringannya atau dengan pertimbangan-pertimbangan lain dari hakim demi masa depan terdakwa.

## **E. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 49/Pid. B/2013/PN. Sungguminasa, berdasarkan beberapa pertimbangan hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa atau Penuntut Umum, maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah diidentifikasi berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- Keterangan saksi-saksi yaitu: Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin, Kaharuddin Bin Pa'do, Abdul Kamal.
- Keterangan terdakwa yaitu : Syamsul Basir Bin M. Basir Dg. Sitaba
- Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan:

1. Setiap Orang

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subyek Hukum, yaitu orang serlaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana;
  - Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal, yaitu tentang identitas terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggung jawabkan apa yang didakwakan apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan –alasan pemaaf;
  - Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Syamsul Basir Bin M.Basir Dg. Sitaba dimana selanjutnya telah ditemukan fakta dimana identitas terdakwa diperhadapkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian
  - Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan dalam diri terdakwa alasan pemaaf seperti dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP oleh karenanya apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya;
  - Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak
- Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;
  - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ini adalah berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguh pun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakw, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;
  - Menimbang, bahwa kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadi seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan kemajuannya karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan, perlawanan dari wanita terhenti, maka perbuatan memaksa

dengan kekerasan tetap terjadi; wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana ia ingin tolak,. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan. Ketentuan dalam Pasal 89 KUHP yang menetapkan bahwa menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, dipersamakan dengan melakukan kekerasan ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan;
- Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
- Menimbang, bahwa definisi anak menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan apakah terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan mendasar pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum di Kampung Paringring, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa telah terjadi peristiwa pelecehan yang dialami oleh saksi korban Citra Kusmira Dewi;
- Bahwa awalnya saksi korban Citra Kusmira Dewi dibonceng oleh saudari Karmila dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dibonceng oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor dan mengikuti saksi korban Citra Kusmira Dewi dari belakang tanpa diketahui oleh saksi korban Citra Kusmira Dewi, pada saat hampir sejajar terdakwa memegang pundak dari saksi korban Citra Kusmira Dewi dan meminta nomor handphone saksi korban lalu saksi korban berkata: "Tidak ada *handphone*ku" lalu terdakwa mengatakan: "Alasan ko", lalu terdakwa menarik lengan baju saksi korban dan memegang payudara sebelah kanan saksi korban Citra Kusmira Dewi sambil diremas.
- Bahwa saksi dibonceng sepeda motor dengan cara duduk laki-laki atau menghadap ke arah depan;



- Bahwa selanjutnya saksi korban saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin bertanya kepada terdakwa: “Apa Maumu?”, lalu terdakwa menendang sepeda motor saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin dan meludahi saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin, dan langsung pergi sambil mengacungkan jempol ke arah bawah;
  - Bahwa akibat dari kejadian ini saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin mengalami trauma;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan sehingga memaksa saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin yang saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak dengan cara awalnya saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin dibonceng oleh saudari Karmila dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dibonceng oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor pula dan mengikuti saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin dari belakang tanpa diketahui oleh saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin, pada saat hampir sejajar terdakwa memegang pundak saksi korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin dan meminta nomor handphone saksi korban lalu saksi korban berkata: “Tidak ada *handphone*ku” lalu terdakwa mengatakan: “Alasan ko”, lalu terdakwa menarik lengan baju saksi korban dan memegang payudara sebelah kanan saksi korban Citra Kusmira Dewi sambil diremas.:
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;
  - Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar terdakwa telah menarik lengan baju korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin dan memegang payudara sebelah kanan korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin sambil diremas ketika posisi motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan korban Citra Kusmira Dewi Binti Syarifuddin dalam keadaan sejajar;
  - Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terbukti dan terpenuhi;
  - Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk memaksa melakukan perbuatan cabul”;

## **F. AMAR PUTUSAN**

Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana dan terdakwa menurut hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

1. Hal-hal yang memberatkan:
  - Sifat dari perbuatan terdakwa
2. Hal-hal yang meringankan
  - Terdakwa bersifat sopan dan berterus terang selama persidangan
  - Terdakwa masih berusia anak-anak

Adapun isi dari amar putusan No. 49/Pid. B/2013/PN. Sungg, ialah:

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

- Menyatakan terdakwa Syamsul Basir Bin M. Basir Dg. Sitaba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk memaksa melakukan perbuatan cabul”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana

denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

## **G. Analisis Penulis**

### **1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Khususnya Dalam Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa**

Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi juga mengenai hukum pidana materiil seperti unsur-unsur dari perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak. Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada di point b karena apabila syarat yang ada di point tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau *Van Rechtswege nieting*.

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi :

- a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;
- c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.

Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b

juga terpenuhi, dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.

Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa menggunakan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal-Pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor: PDM-13/Sunggu/Ep.3/02/2013 dan diterapkan dalam putusan nomor: 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-Pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Syamsul Basir Bin M. Basir dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa melanggar dakwaan tunggal yakni Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa.**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan Pasal di atas, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim tentang alasan pemberian pidana penjara bagi terdakwa yang tergolong anak, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim yakni Yoga D.A. Nugroho pada tanggal 11 Desember 2013 menyakan bahwa:

“Dalam kasus ini, terdakwa sebagai anak, yang mana korbannya juga adalah anak, sehingga hakim harus berada di posisi netral. Melihat umur terdakwa sebagai anak yaitu 16 tahun, maka kami menilai telah terdapat potensi yang memungkinkan bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Serta melihat implikasi bagi korban yang juga anak ke depannya, maka untuk memberi keadilan bagi korban, terdakwa kami beri pidana penjara dan saran BAPAS untuk mengembalikan terdakwa kepada keluarga untuk dibina kami tidak setuju akan hal itu.”

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim tentang jangka waktu pidana penjara bagi terdakwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim sebelumnya yang menyatakan bahwa:

“Alasan majelis hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal melainkan pidana minimal adalah karena dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikatakan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak lamanya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa maka dalam putusan ini hakim mengambil setengah dari ancaman pidana minimal yaitu setengah dari 3 (tiga) tahun yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Kemudian kami menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut itu sudah sangat lama bagi seorang anak. Kami berharap bahwa setelah menjalani pidana penjara tersebut, maka terdakwa bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.”

Dalam mempertimbangkan hal tersebut, hakim melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemidanaan absolut, namun mendasarkan pada teori pemidanaan relatif yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi, apalagi melihat bahwa terdakwa disini masih anak-anak. Atas dasar itu hakim kemudian memutuskan perkara tersebut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pernyataan tersebut memang dapat dibenarkan karena hakim memiliki kekuasaan yang absolut dalam memutus perkara. Selanjutnya, adapun hal-hal yang meringankan pidana tersebut dalam putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa yang terdiri dari:



- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih berusia anak-anak

Hal-hal yang meringankan tersebut sebenarnya tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang melihat bahwa korban sendiri masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih dibawah umur dimana implikasi dari perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma psikologi berkepanjangan. Terhadap hal-hal yang meringankan pidana tersebut penulis akan menguraikannya satu persatu.

- Terdakwa sopan di persidangan

Keadaan sopan tersebut menurut penulis tidak perlu untuk dimasukkan sebagai hal yang meringankan pidana. Sopannya terdakwa memang merupakan kewajiban bagi terdakwa sebagai orang yang bersalah dalam persidangan. Menurut penulis, keadaan sopan tersebut dapat saja dilandasi oleh sikap kepura-puraan dalam rangka untuk mendapatkan simpati hakim agar mendapatkan pengurangan hukuman. Dengan demikian menurut penulis, keadaan sopan dalam persidangan ini tidak harus dimasukkan kedalam hal meringankan pidana.

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Pengakuan terdakwa menurut penulis tidak dapat dijadikan sebagai alasan peringanan pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu alat

bukti yang sah walaupun berada dalam posisi terbawah dari susunan alat bukti. Adanya pengakuan terdakwa sebagai alasan peringanan pidana menurut penulis tidak diperlukan dalam perkara ini. Alasan tersebut didasarkan penulis bahwa pengakuan terdakwa tidak diperlukan sebab alat bukti serta barang bukti yang lain sudah menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Selain itu, apabila melihat dari putusan maka keterangan terdakwa sangat berbeda atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga keterangan terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai alasan peringanan pidana. Berbeda halnya apabila terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut menyerahkan diri di kepolisian, maka kepadanya dapat diberikan hal-hal peringanan pidana.

- Terdakwa masih berusia anak-anak

Hal tersebut memang patut untuk dimasukkan sebagai alasan peringanan pidana karena sistem peradilan di Indonesia lebih condong menganut sistem pemidanaan realtif yang bertujuan untuk memperbaiki terdakwa. Seperti yang dijelaskan hakim dalam wawancara ketika hakim ditanya mengenai alasan hakim menjatuhkan pidana minimal bukan maksimal dari ancaman pidana seperti yang di uraikan sebelumnya diatas. Maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut memang dapat dijadikan sebagai alasan peringanan pidana .

Selanjutnya, selain hal-hal yang meringankan diatas maka terdapat pula hal-hal yang memberatkan seperti dalam putusan No.49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa yaitu :

- Sifat dari perbuatan terdakwa

Menurut penulis bahwa majelis hakim dalam menguraikan hal yang memberatkan dalam putusan dianggap kurang jelas sehingga penulis berinisiatif untuk menanyakan kepada majelis hakim makna dari kalimat sifat dari perbuatan terdakwa melalui wawancara mengenai pertimbangan hakim tentang alasan memberatkan dengan salah satu hakim yakni Yoga D.A. Nugroho yang menyatakan bahwa:

“Sifat perbuatan dari terdakwa menjadi alasan memberatkan, hal ini berarti bahwa karena perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma lain seperti norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan maka hal tersebut menjadi alasan memberatkan pidana”

Selain itu, berdasarkan putusan majelis hakim dalam Putusan No.49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa yang menyatakan bahwa :

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan kurungan selama 1 (satu) bulan.”

Dalam penjatuhan pidana di atas maka penulis menyatakan tidak sependapat dengan pemberlakuan pidana denda yang apabila tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan karena

penulis berpendapat bahwa hal tersebut menyalahi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997 sebagai berikut :

*“Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.”*

sehingga penulis berkesimpulan bahwa putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tidak tepat atau dapat dikatakan bahwa majelis hakim keliru dalam menjatuhkan putusan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KUHP. Berawal dari Rumusan surat dakwaan tersebut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan Pasal-Pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Syamsul Basir Bin M. Basir dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka selanjutnya, Hakim berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan No. 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Syamsul Basir sebagai pelaku pencabulan

tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menyangkut berat ringannya pidana (*strafmaat*) menurut penulis tidak seharusnya dijadikan sebagai hal yang meringankan terdakwa antara lain sopan di persidangan, dan berterus terang selama persidangan, karena hal yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu kewajiban bagi terdakwa yang bersalah dalam persidangan. Kemudian, masih terdapat hal-hal yang memberatkan yakni sifat dari perbuatan terdakwa, adapun yang dimaksud dalam hal ini yaitu sifat perbuatan terdakwa yang bukan hanya melanggar hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma lain seperti norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Sehingga telah tepat hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan.

## **B. Saran.**

1. Penuntut umum harus senantiasa teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan

terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Karena hal tersebut sama sekali tidak menjamin bahwa terpidana sungguh-sungguh memiliki sifat atau kepribadian yang baik.
3. Hakim harus memutus perkara dengan teliti termasuk melihat sumber Undang-Undang yang terkait. Pada kasus ini, hakim memjatuhkan pidana denda yang dialternatifkan dengan kurungan sedangkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 seharusnya apabila denda tidak dapat dibayar maka digantikan dengan latihan kerja bukan digantikan dengan kurungan. Hal ini menggambarkan bahwa hakim dalam proses persidangan pada anak selalu mengedepankan sanksi pidana yang sedikit banyak bertentangan dengan asas *the last resort*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali, Achmad. *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2010.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hidayat, Bunadi, . *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010.

Ilyas, Amir. *Asas-asas hukum pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Lamintang, P.A.F, . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Nandang, Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Imu, Bandung, 2010.



Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010.

R. Soesilo . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Adatya Bakti, Bandung, 2003.

Abidin. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2010 .

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak



# PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE NO. 103 TELP. (0411) 861129-861089  
SUNGGUMINASA - KABUPATEN GOWA 92111

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3 / 14 / AT / I / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa :

N a m a : **YENNI WIDYASTUTI.**  
Nomor Induk Mahasiswa : **B111 10 906**  
Jenis kelamin : **Perempuan.**  
Fakultas/Universitas : **Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.**  
A l a m a t : **Jl.Ir. Soetami Villa Muttiara Hijau XX No.30 Makassar.**

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN GOWA**". ( Studi Kasus Perkara Pidana No. 49/PID.B/2013/PN. SUNGG ).

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 21 Januari 2014.

PANITERA MUDA HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA



**HERNAWATI, SH.**

NIP. 19631231 198503 2 035

Tembusan :

- Arsip